

**KAPITALISASI MASYARAKAT NELAYAN-PETANI
PESISIR SELATAN PULAU JAWA¹
(Studi Kasus Masyarakat Nelayan Watukarung)**

Oleh: Eko Digdoyo
Program Studi Ilmu Komunikasi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Abstraksi

Kajian ini bermaksud menyampaikan dua identitas ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pantai selatan Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Watukarung masih menghadapi kendala, antara lain; (1) kondisi geografis yang sulit untuk dikembangkan, (2) ilmu pengetahuan tata kelola masyarakat (SDM) yang masih sangat terbatas, (3) sentuhan atau perhatian pemerintah baik melalui penyuluhan, pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat masih kurang, (4) terbatasnya akses mobilitas sosial ekonomi (sarana dan prasarana atau IPTEK). Oleh karena itu, dampaknya terjadi sistem kapitalisasi. Kapitalisasi ekonomi masyarakat nelayan cenderung lebih kuat daripada sistem ekonomi kerakyatan. Penguasaan pemilik modal (*patron*) lebih dominan dan akhirnya masyarakat nelayan mengalami kemiskinan dan pemiskinan. Hasil kajian menunjukkan masyarakat nelayan cenderung dibuat lemah. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan melalui pembinaan dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan. Pemerintah memiliki tanggungjawab sosial khususnya perlindungan harga yang memihak nelayan. Agar tidak menyengsarakan masyarakat nelayan, pemerintah daerah hendaknya melakukan kontrol harga ikan atau setidaknya turut campurtangan melakukan pembelaan harga ikan yang membela nelayan. Harga ikan mestinya tidak diserahkan sepenuhnya kepada kapitalis (pemilik modal atau para tengkulak).

A. Latarbelakang Masalah

Secara geografis Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, serta daratan yang subur. Oleh karena itu, sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Menjadi tidak wajar manakala kekayaan yang sedemikian besar ternyata tidak menjadi hidup lebih sejahtera. Para ekonom dan ilmuwan seringkali mengatakan bahwa semenjak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan puncak gunung es atas salahnya kelola negeri ini termasuk salah satunya pengelolaan ekonomi kelautan. Semboyan maupun slogan bahwa nenek moyangku orang pelaut sudah tidak segencar pada era sebelumnya. Bahkan usaha di sektor kelautan saat ini sedang mendera para nelayan baik keadaan cuaca (iklim) maupun kebijakan pemerintah yang dianggap kurang pro-nelayan.

¹Materi disampaikan dalam acara Kolokium Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam Rangka Wisuda UHAMKA (7 Desember 2018)

Beberapa kajian di sektor kelautan dan perikanan seringkali menjadi salah satu contoh bentuk salah kelola yang ada di negeri ini. Kajian Kusnadi (2008: v) menegaskan bahwa telah berpuluh-puluh tahun perhatian pada sektor kelautan dan perikanan bisa dikatakan minus. Akibatnya lebih jauh, laut dan ikan yang menjadi kekayaan negeri ini menjadi terbengkelai dan ironisnya hanya dinikmati beberapa gelintir orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup kenikmatan.

Oleh karena itu, berbagai kritik tajam dan arah pembangunan yang berorientasi ke daratan menjadi titik pacu membangun dunia kelautan. Laut yang selama ini termarginalisasi, hanya dijadikan tempat buangan baik sampah maupun limbah, akhirnya mendapat perhatian baru. Masyarakat di daerah perairan laut yang kenyang dengan kemiskinan, derita keterbelakangan, dan kekumuhan lingkungan hendaknya mendapat injeksi untuk kebangkitan dunia baru.

Walaupun demikian jika kita perhatikan selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata belum sepenuhnya menyentuh kehidupan kelompok sosial yang paling rentan secara ekonomi, yakni nelayan buruh dan nelayan tradisional. Demikian juga target tujuan yang akan dicapai oleh program-program intervensi pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir sejak tahun 2001 masih belum optimal. Sementara itu, kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta konflik-konflik sosial antar kelompok nelayan dengan berbagai sebab masih sering terjadi.

Jadi, perhatian terhadap pembangunan kawasan pesisir dan pemihakan pembangunan terhadap masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan harus senantiasa dikembangkan. Aspek strategis dalam hal ini adalah karena sumber daya pesisir dan kelautan yang kita miliki merupakan potensi dan modal pembangunan nasional di masa depan. Ketika peran sumber daya pertanian, perkebunan, dan kehutanan sudah mulai surut ke belakang, maka sumber daya kemaritiman-kelautan perlu digaungkan melalui aplikatif yang melibatkan nelayan, masyarakat, serta kebijakan publik dari pemerintah baik daerah maupun pusat.

Selanjutnya jika mengacu pendapat mantan Menteri Kelautan (Rokhmin Dahuri) perlu upaya serta terobosan penanganan kemiskinan masyarakat maritim. Kemiskinan nelayan buruh dan tradisional merupakan masalah serius yang harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua pihak. Nelayan yang hidup di desa-desa pesisir yang perairannya sudah dalam konsidi tangkap lebih (*overfishing*) akan menghadapi tekanan-tekanan sosial ekonomi yang lebih berat daripada nelayan yang hidup di desa-desa pesisir yang kondisi sumber daya perikananannya masih potensial. Aspek-aspek lingkungan, keragaman potensi sumber daya ekonomi lokal, peluang

pasar, kualitas sumber daya manusia nelayan, dan sebagainya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas kemiskinan nelayan. Akibatnya, penanganan kemiskinan nelayan juga bukan merupakan masalah yang sederhana.

Sebagai wujud tanggungjawab nasional dalam mengatasi kemiskinan nelayan, pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat pesisir, yang salah satunya adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) (Kusnadi, 2008: xvi). Sejak tahun 2001 sumber pembiayaan Program PEMP berasal dari kompensasi pengurangan subsidi energi atau Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPD-SE). Data dari tahun 2000 sampai tahun 2003 program PEMP sudah dilaksanakan di sebagian besar kabupaten atau kota pesisir di seluruh Indonesia.

Tujuan utama Program PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kapabilitas kelembagaan sosial-ekonomi, dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Kelompok sasaran yang menjadi prioritas program PEMP adalah nelayan tradisional, nelayan buruh, pedagang dan pengolah ikan berskala kecil, dan pengelola sarana penunjang usaha perikanan skala kecil. Mereka termasuk kelompok sosial dalam masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan ekonomi.

Keberhasilan program PEMP sangat ditentukan oleh kesungguhan masyarakat pesisir dalam memanfaatkan dan mengembangkan pendanaan program secara bertanggungjawab serta berkelanjutan, maksimalisasi kinerja koordinasi antar instansi atau antar pihak terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan program, serta ketepatan pendekatan yang dipilih dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Berbagai macam program memang telah digulirkan, namun belum sampai sasaran. Kajian penelitian ini berusaha mengungkap aspek lain sosial-ekonomi masyarakat nelayan-petani di wilayah pesisir selatan pulau Jawa khususnya di daerah Watu Karung yang mengalami kapitalisasi. Jika dibandingkan dengan masyarakat pesisir utara Jawa yang nota bene hanya mengandalkan ekonomi kelautan, sehingga apabila sedang mengalami “*paceklik*, gelombang tinggi, tangkapan ikan minus” masyarakat menjadi tidak berdaya karena hanya mengandalkan bernelayan. Sementara itu berbeda dengan masyarakat nelayan di pesisir selatan pulau Jawa. Masyarakat tersebut memiliki pola pemranataan sebagai seorang nelayan, namun sekaligus

sebagai petani. Artinya apabila keadaan ikan di laut sedang tidak menguntungkan serta keadaan cuaca buruk, maka harapan hidup lainnya adalah sebagai petani sebagai penopang ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu walaupun mengalami *paceklik*, kenyataannya keadaan ekonomi masyarakat nelayan-petani di pesisir selatan pulau Jawa lebih sejahtera atau mapan di banding nelayan pesisir utara pulau Jawa. Walaupun demikian jika dikaji dalam sudut pandang sosio-antropologis, kemiskinan masyarakat nelayan tidak bisa dipungkiri.

Sebagaimana pandangan Kusnadi (2008:19), sebab kemiskinan masyarakat nelayan berangkat dari aspek internal dan eksternal. Sebab internal mencakup masalah: 1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, 2) keterlibatan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan yang kurang, 3) hubungan kerja pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, 4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, 5) ketergantungan yang tinggi terhadap akupasi melaut, dan 6) gaya hidup boros dan kurang berorientasi ke masa depan.

Sementara itu, kemiskinan yang bersifat eksternal, meliputi: 1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial, 2) sistem pemasaran yang cenderung lebih menguntungkan para pedagang perantara, 3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir, 4) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, 5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, 6) terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pascapanen, 7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor nonperikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, 8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, 9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia.

Berangkat dari pemaparan di atas perlu sekali kiranya untuk dilakukan analisis kajian terhadap kondisi ekonomi masyarakat nelayan-petani saat ini. Oleh karenanya masalah yang perlu dijawab adalah; 1) bagaimanakah strategi pemranataan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan-petani pesisir selatan, 2) apakah bentuk upaya masyarakat nelayan-petani, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi yang penuh ketidakpastian baik dari segi geografis maupun kebijakan terkait lainnya, dan 3) bagaimana mengatasi sistem kapitalisasi ?

B. Pendekatan Teori dan Kajian Pustaka

Secara konseptual kajian ini pendekatan teori *materialisme cultural*, teori ini diperkenalkan oleh Marfin Harris. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia hidup tidak ada yang luput dengan kebutuhan hidup khususnya materi. Materi sebagai kebutuhan pokok khususnya pangan. Secara teori pangan merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia, sebab tanpa pangan manusia tidak dapat berpikir dan beraktivitas secara sehat dan positif. Ketika pangan tidak tercukupi aktivitas serta pola pikir manusia tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sebaliknya ketika pangan bagi manusia telah tercukupi, maka aktivitas manusia dapat berjalan baik dan dapat berpikir secara positif untuk berpikir masa depan. Materi dapat menjadi salah satu identitas pemenuhan kebutuhan hidup bagi manusia baik secara individu maupun secara kelompok (komunitas).

Kajian ini secara konseptual dapat dibangun melalui teori di atas, di mana ketika manusia ingin mendapatkan kebutuhan hidup khususnya pangan, maka dilakukan berbagai upaya dan salah satunya adalah melalui jenis kegiatan profesi berdasarkan geografis, yaitu; petani, nelayan, pegawai dan buruh. Jadi, kajian ini mengambil obyek pranata ekonomi dan sosial khususnya sistem atau pranata ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.

Kajian Kusnadi (2008) memaparkan persoalan kritis di bidang sosial ekonomi muncul karena sebab-sebab yang kompleks. Berbagai persoalan tersebut terkait dengan isu-isu tentang keterbatasan kualitas peralatan tangkap, kesulitan akses terhadap sumber daya modal, kelemahan sumber daya nelayan (manusia), sistem pembagian hasil yang kurang adil dalam organisasi penangkapan, hubungan ekonomi yang eksploitatif dengan menyediakan modal informal, dan belum berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi, seperti KUD /TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Baik lembaga-lembaga ekonomi maupun pranata-pranata sosial budaya merupakan unsur penting dan memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan nelayan. Dari sudut pandang antropologis, fungsi lembaga ekonomi dan pranata-pranata sosial budaya sangat membantu nelayan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Oleh karena itu, perhatian terhadap kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga ekonomi dan pranata sosial budaya sangat penting dilakukan.

Dua aspek yang sangat menentukan dalam kaitannya dengan kegiatan kenelayanan dan yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan hidupnya adalah aspek kelembagaan sebagai bagian dari pranata produksi dan distribusi hasil tangkapan. Hubungan-

hubungan sosial yang melingkupi dua aspek tersebut kurang menguntungkan nelayan atau buruh nelayan. Oleh karena itu, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau lembaga alternatif lainnya perlu diberdayakan atau diciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi hubungan-hubungan sosial ekonomi yang timpang tersebut. Sementara itu, pranata-pranata sosial yang ada, seperti; arisan, jaringan sosial, perkumpulan simpan-pinjam, dan perkumpulan pengajian, peranya masih bersifat karikatif dalam mengatasi tekanan-tekanan kehidupan masyarakat nelayan.

Selama ini seringkali TPI yang ada belum menjamin dan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga keberadaanya tidak memberikan keuntungan ekonomis kepada nelayan. Bahkan dengan penarikan retribusi, nelayan justru merasa dirugikan. Dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, sebagian besar nelayan menjamin uang dari pedagang perantara (*pengamba*). Hubungan ini tentu saja tidak menguntungkan nelayan dalam jangka panjang, sebab biasanya para *pengamba* menguasai informasi pasar dan jaringan pemasaran ikan. Lembaga keuangan lainnya seperti; perbankan, kurang berfungsi dalam membantu permodalan nelayan.

Melalui kemampuan sumber daya manusia yang ada, pengalaman institusi, dan dengan memperhatikan aspek strategis kedudukan kelembagaan ekonomi dan pranata sosial budaya dalam kehidupan masyarakat nelayan, kita harus memberikan perhatian yang serius terhadap revitalisasi dan pengembangan kelembagaan ekonomi serta pranata-pranata sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Proposisi dasar yang menjadi alasan memilih pusat perhatian ini adalah bahwa upaya-upaya besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan harus berpijak pada potensi kelembagaan ekonomi dan pranata sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat nelayan atau yang sudah mereka kenal dengan baik sebagai bagian integral dalam sistem kehidupan masyarakat nelayan.

Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007).

Dalam tulisan ini, dikemukakan konstruksi sosial masyarakat nelayan dengan mengacu pada konteks pemikiran di atas, yaitu suatu konstruksi masyarakat yang kehidupan sosial

budayanya dipengaruhi secara signifikan oleh eksistensi kelompok–kelompok sosial yang kelangsungan hidupnya bergantung pada usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir yang memiliki pemranataan sosial tersendiri sebagai identitas kehidupan.

Bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai "pedoman kehidupan", referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989:68-69). Setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak, kebudayaan itu bisa hilang dalam waktu yang tidak lama. Kebudayaan haruslah membantu kemampuan survival masyarakat atau penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya. Sebagai suatu pedoman untuk bertindak bagi warga masyarakat, isi kebudayaan adalah rumusan dari tujuan-tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, yang disepakati secara sosial (Kluckhohn, 1984:85-91).

Di dalam perspektif antropologis untuk memahami eksistensi suatu masyarakat bertitik tolak dan berorientasi pada hasil hubungan dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Karena itu, dalam beragam lingkungan yang melingkupi kehidupan manusia, satuan sosial yang terbentuk melalui proses demikian dapat menampilkan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai upaya memahami masyarakat nelayan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, berikut ini akan dideskripsikan beberapa aspek antropologis yang dipandang penting sebagai pembangun identitas kebudayaan masyarakat nelayan, seperti sistem gender, relasi patron-klien, pola-pola eksploitasi sumber daya perikanan, dan kepemimpinan sosial.

Para sarjana maupun peneliti telah menghasilkan berbagai obyek kajian khususnya masyarakat nelayan. Sebelumnya Dr. Pujo Semedi Hargoyuwono (2000) (Antropolog Universitas Gadjah Mada) melalui disertasinya Leden University menghasilkan khasanah pustaka khususnya kajian masyarakat nelayan dengan mengambil seting studi kasus nelayan Pekalongan. Sebagaimana pandangan yang ia kemukakan bahwa sementara ini atau hingga saat ini berdasarkan peta penelitiannya disimpulkan bahwa tidak ada masyarakat nelayan yang kaya akibat berbagai sebab. Umumnya nelayan di nusantara ini mengalami kemiskinan. Jika diketemukan nelayan kaya, ternyata bukan nelayan yang terjun ke laut, namun ternyata juragan nelayan atau pemilik modal.

Penelitian Ari Wahyono, mengungkapkan bahwa masalah ketergantungan pada tengkulak merupakan masalah serius yang dihadapi nelayan. Adanya ketergantungan ini menyebabkan pendapatan nelayan tidak maksimal, karena mereka diharuskan menjual hasil tangkapan kepada pedagang ikan dengan harga yang sepihak. Ketergantungan ini terjadi bukan karena keinginan nelayan, tetapi justru karena keterpaksaan, karena tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan modal pengadaan alat tangkap maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wahyono, dkk, 2001: 185).

Kusnadi (2007) membahas mengenai jaminan sosial nelayan, sebab di dalam masyarakat nelayan terdapat ketimpangan relasi negara dan masyarakat, manifestasi dan resistensi, kemandirian hidup, relasi *patron-kline* sebagai bentuk rasa aman. Pada tahun yang sama, Kusnadi (2007) menghasilkan kajian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan karena adanya potensi sumber daya pembangunan wilayah yang meliputi; sumber daya alam (perikanan dan pengolahan, pariwisata pantai, pertanian dan perkebunan), sumber daya sosial, dan sumber daya fisik. Kajian ini dipertegas mengenai upaya strategi pengelolaan sumber daya serta peluang usaha bagi masyarakat nelayan.

Peneliti dalam hal ini termotivasi untuk meneliti obyek yang berbeda serta wilayah dan keadaan geografis yang berbeda. Peneliti memilih masyarakat nelayan-petani di pesisir pantai selatan Pulau Jawa khususnya pantai Watukarung. Alasan mendasar dipilihnya obyek tersebut secara mendasar keadaan masyarakat baik geografis maupun sumber daya manusia agak berbeda dibanding dengan studi kasus penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak keadaan alam (geografis) dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengamatan awal masyarakat Watukarung ternyata tidak hanya mengadakan melaut saja, melainkan alih profesi sebagai petani pada saat geografis tidak menguntungkan, sehingga masyarakat nelayan Watukarung memiliki dua obyek ekonomi yaitu sebagai nelayan sekaligus sebagai petani. Atas dasar itulah maka perlu dilakukan penelitian dan pengkajian mendalam.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Gambaran Umum Geografis

Secara geografis, Desa Watukarung merupakan salah satu desa yang masuk di wilayah Dusun Ketro Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. Desa tersebut merupakan kawasan Pegunungan Seribu (Gunung Sewu) yang terletak di kawasan selatan Pulau Jawa, oleh karena itu

kawasan ini memiliki keunikan tatanan geologi dan hidrologi. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan bebatuan atau kars yang tersusun oleh batu bedes-gamping yang mengandung karbonat (CaCO_3), sehingga mudah mengalami proses pelarutan oleh adanya reaksi kimia dengan air hujan yang bersifat asam.

Desa Watukarung merupakan salah satu desa di Pantai Selatan yang sangat menarik dalam kajian ini. Beberapa ciri khas wilayah desa ini memiliki dua areal pantai yaitu pantai Pasir Putih (khusus areal wisata), dan pantai untuk wisata sekaligus sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, umumnya masyarakat menggantungkan hidupnya pada kondisi alam untuk bertani di ladang tadah hujan dan rata-rata setahun hanya satu kali panen berupa padi dan tanaman tambahan atau *tumpang-sari* yang berupa; singkong, kacang, dan kedelai. Pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut umumnya juga menggantungkan cuaca, jika cuaca bagus (hujan), maka ekonomi masyarakat agak lumayan, tetapi jika cuaca tidak bagus masyarakat mengalami kendala besar yang mengakibatkan kegagalan panen karena cuaca maupun hama tanaman. Akhir-akhir ini petani maupun nelayan sering tidak beruntung akibat perubahan cuaca yang tidak menentu.

Masyarakat Kabupaten Pacitan Khususnya di Desa Watukarung sebagian besar di samping usaha sebagai nelayan, ia memiliki mata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan lahan-lahan di sekitar cekungan-cekungan kars (*doline*) sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Lahan pertanian dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan teknologi-teknologi konvensional yang telah mereka pelajari dari zaman nenek moyangnya secara turun-temurun dan dikembangkan secara tradisional untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan perubahan lahan.

Kebutuhan khususnya air sebagai penyubur lahan pertanian di kawasan tersebut menjadi permasalahan yang dialami oleh para petani dalam mengelola lahannya, ketersediaan sumberdaya alam yang ada memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat mengelolanya secara manual, kondisi ini mengakibatkan adanya usaha-usaha masyarakat dalam mengelola sumber daya air yang ada di permukaan dan bawah permukaan secara tradisional dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal baik yang mengandung unsur mitos atau kepercayaan dan

kebudayaan-kebudayaan sebagai tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku di sekitar kawasan pesisir selatan.

Oleh karena itu, guna mengatasi kesulitan ekonomi dengan modal tenaga atau fisik salah jalan keluarnya adalah dengan cara merantau (urban) untuk mencari pekerjaan di kota besar seperti; Solo, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Melihat keadaan yang demikian terbatas, maka semenjak Orde Baru Kabupaten Pacitan mendapatkan sebutan sebagai masyarakat tertinggal atau daerah IDT.

Dalam bidang sosial-kemasyarakatan, seperti pada desa-desa lain, Desa Watukarung dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya serti; Sekdes, BPD, Bayan, Kadus (RW), dan RT. Dalam bidang politik dapat dikatakan mengalami pasang-surut menurut tren yang terjadi, contoh; ketika Orde Baru umumnya mayoritas rakyat memilih Partai Golkar, partai lain PDI dan PPP disinyalir kurang peminatnya. Ketika Orde Reformasi dengan munculnya banyaknya partai, masyarakat agak sedikit berpaling ke Partai PDI-P, partai Golkar menjadi urutan ke dua, berikutnya diikuti Partai Demokrat dan partai lain. Pada era selanjutnya masyarakat cenderung memilih partai Demokrat, hal ini terbukti masyarakat nelayan berbondong-bondong mengibarkan bendera Partai Demokrat dan PDI-P.

3. Akar Permasalahan Masyarakat Nelayan

Studi-studi mengenai kemiskinan nelayan memberikan gambaran yang jelas mengenai kehidupan masyarakat nelayan khususnya nelayan tradisional dan nelayan buruh. Bagong Suyanto (1996:7-15) menggambarkan bahwa kehidupan nelayan tradisional dan buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, sedikit kegoncangan atau kebutuhan mendadak, mereka mengalami *collapse*. Faktor penyebabnya menurut Suyanto, adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari kungkungan alam dan irama musim yang sulit ditebak, ketinggalan teknologi, kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, penghisapan dan posisi tawar-menawar yang lemah. Firth (1966:5) dalam salah satu penelitian di Malaysia, menambahkan bahwa musim dan cuaca dapat tiba-tiba menghentikan kegiatan penangkapan ikan di laut. Terhentinya usaha penangkapan berarti terhentinya sumber penghasilan untuk para nelayan. Dalam situasi seperti itu, para nelayan terpaksa menguras kembali tabungan kalau ada, atau mengambil kredit.

Kusnadi (2003:19), dalam analisisnya bahwa terdapat sebab yang kompleks, mengapa kemiskinan nelayan terus terjadi. Ia menjelaskan ada sebab internal dan eksternal dalam masyarakat nelayan, sebab internal antara lain:

- a. keterbatasan sumber daya manusia,
- b. kemampuan modal usaha,
- c. relasi pemilik–nelayan buruh,
- d. kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan dan ketergantungan yang tinggi terhadap *okupasi* melaut.

Sementara sebab kemiskinan yang bersifat eksternal yang berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, antara lain:

- a. kebijaksanaan pembangunan perikanan yang berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional,
- b. sistem pemasaran hasil perikanan yang mengundang pedagang perantara,
- c. kerusakan ekosistem pesisir dan laut,
- d. penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan,
- e. kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun.

Lebih lanjut Kusnadi menambahkan bahwa problem kemiskinan masyarakat nelayan mulai muncul ke permukaan setelah satu dekade dilaksanakannya kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 1970-an. Kebijakan ini dikenal dengan istilah revolusi biru (*blue revolution*). Proyek besar ini berimplikasi pada keserakahan sosial atas sumber daya perikanan yang mendorong setiap individu untuk berkuasa penuh terhadap sumber daya tersebut. Keserakahan ini dapat berakibat pada kelangkaan sumber daya perikanan. Kompetisi yang semakin tinggi dan kesenjangan akses dan pendapatan yang berimplikasi pada timbulnya kesenjangan sosial ekonomi antar pengguna sumber daya perikanan (Kusnadi, 2003: 21).

Kebijakan motorisasi dan modernisasi, ternyata banyak menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Beberapa penelitian memperlihatkan dampak negatif dari proyek yang dikenal

dengan istilah *blue revolution* ini. Donald K. Emerson (1979) menulis, pemberian bantuan teknologi motorisasi, memberikan dampak negatif bagi produktivitas nelayan; karena motorisasi, ikan-ikan yang semula biasa ditangkap nelayan tradisional dapat disedot oleh nelayan yang memiliki kapal modern bermesin dengan alat yang berdaya tangkap besar (Mubyarto dkk, 1984: 18-19).

Studi yang dilakukan Mubyarto dkk (1984) terhadap kehidupan nelayan tradisional di dua desa pantai Kabupaten Jepara Jawa Tengah mengungkapkan tentang adanya penurunan jumlah pendapatan nelayan tradisional di daerah itu akibat beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan modern. Hasil studi ini menunjukkan bahwa semenjak kurun waktu 1973 - 1977 setiap nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan sebesar 58%.

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan; pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan. Kondisi nyata masyarakat nelayan baik di Watukarung maupun lainnya umumnya sama yaitu;

1. Kondisi Alam

Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim *paceklik* yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan dapat semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) setiap tahunnya.

2. Tingkat pendidikan nelayan

Nelayan umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam

hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan staregi tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi.

3. Pola kehidupan nelayan sendiri

Pola hidup boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskian nelayan. Padahal kultur nelayan jika dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Bayangkan mereka pergi subuh pulang siang, kemudian menyempatkan waktunya pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Memang ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros dan hal tersebut menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah.

4. Pemasaran hasil tangkapan

Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Di Watukarung walaupun kecil telah terdapat (TPI), namun ketika nelayan sedang banyak tangkapan seringkali tidak berdaya ketika menghadapi pedagang akibat terjadinya monopoli harga ikan. Pedagang seringkali juga tidak bertanggungjawab ketika tangkapan ikan membanjir sementara harga menurun.

5. Program pemerintah yang tidak memihak nelayan

Studi kasus yang sering terjadi adalah adanya kenaikan harga BBM yang merupakan momok bagi nelayan terutama pada jenis bahan bakar solar. Jika sampan bermesin ukuran 5-12 PK membutuhkan rata-rata 10 liter solar sekali melaut, maka setiap sampan akan mengeluarkan biaya Rp.65.000,- dalam kondisi harga normal atau di pangkalan sebesar Rp.6.500/liter. Oleh karena itu kurangnya ketersediaan bahan bakar, maka semakin panjanglah rantai pasarnya dan semakin tinggilah harga solar sampai ke tangan nelayan. Harga tersebut ‘terpaksa’ dibeli, untuk bisa melanjutkan hidup dengan melaut, meskipun dengan kondisi pas-pasan.

Persoalan lain adalah tidak semua nelayan memiliki perahu sendiri. Nelayan yang tidak mempunyai modal untuk membeli perahu, terpaksa meminjam uang kepada tengkulak (*juragan*). Pada umumnya para tengkulak (*tokeh/patron*) memberikan pinjaman kalau hasil tangkapan nelayan (klien) minim atau “nombok”. Ketergantungan nelayan pada *tokehnya* berawal dari utang/pinjaman, dan biasanya dilakukan pada saat *paceklik* atau memperbaiki kerusakan alat tangkap seperti jaring dan mengganti tali kajar. Meskipun demikian, ada juga pihak yang menilai bahwa keberadaan para patron (*tokeh*) tersebut justru menolong nelayan. Konon, selama ini negara tidak mampu memberikan pinjaman lunak, dan walaupun ada bank, mereka juga tidak bisa mengaksesnya karena alat tangkap sebagai faktor produksi tak bisa jadi agunan. Kendala masyarakat nelayan di Watukarung adalah jangkauan bank juga harus pergi ke kota kabupaten dan masih terbatas pada bank-bank tertentu misalnya BRI.

4. Kapitalisasi Masyarakat Nelayan

Semenjak masuk Sekolah Dasar, Pak Guru dan Bu Guru telah mengajarkan nyanyian “*Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudera, diterjang ombak, diterjang badai, sudah biasa....*”. Nyanyian itu pastinya tidak lagi asing di telinga kita. Betapa tidak, dari kecil kita sudah diajari oleh guru kita tentang lantunan lagu tersebut. Tapi apakah kita sadar, ternyata nyanyian itu tidak hanya sekedar nyanyian belaka. Pelaut sangat identik dengan orang-orang yang hidup di daerah perairan atau lebih tepatnya disebut dengan laut. Indonesia, sebuah negara maritim yang lebih dari wilayah lautnya meliputi 2/3 dari seluruh luas wilayah negara dan memiliki kekayaan bahari yang begitu melimpah, layaklah menjadi surga setiap pelaut dan nelayan yang hidup di nusantara ini.

Rasanya sulit untuk sekedar menjawab atas pertanyaan tersebut. Kenyataannya, nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia justru berada di bawah garis kemiskinan dan selama ini menjadi golongan yang paling terpinggirkan karena kebijakan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 persen % di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Di sisi lain pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan pesisir selalu beriringan dengan kerusakan lingkungan dan habitat seperti terumbu karang dan hutan mangrove, dan hampir semua ekosistem pesisir Indonesia terancam kelestariannya.

Hal tersebut menimbulkan sebuah ironi luar biasa bagi kita semua karena bagaimana bisa, sebuah negeri dengan kekayaan laut yang begitu melimpah malah tidak memberikan kesejahteraan bagi para nelayan? Apa sebetulnya yang menjadi masalah? Tulisan berikut ini akan mencoba untuk menguraikan permasalahan tersebut secara lebih mendalam.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari sudut ekonomi saja karena kemiskinan ternyata berkaitan dengan berbagai aspek, di antaranya aspek sosial budaya, bahwa persoalan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan budaya. Dari sudut ini, kita dapat melihat bahwa budaya turut ambil bagian dalam membuat seseorang menjadi miskin. Sementara pemiskinan adalah ketidakberdayaan ekonomi masyarakat nelayan akibat terbentuk oleh situasi pada kebijakan-kebijakan tertentu. Kapitalisme masyarakat nelayan berarti pengambilalihan sistem ekonomi masyarakat nelayan akibat ulah para pemilik modal atau pedagang tengkulak.

Menurut teori konservatif, kemiskinan berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin (Giddens, 1986). Seseorang menjadi miskin bukan hanya karena masalah mental atau tiadanya kesempatan untuk sejahtera, tetapi juga karena adanya perspektif masyarakat yang menyisihkan dan memiskinkan orang. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan setidaknya terkait dengan tiga dimensi, yaitu :

a. Dimensi Ekonomi

Kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang, baik secara financial ataupun segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (SDM-SDA).

b. Dimensi Sosial dan Budaya

Kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat.

c. Dimensi Sosial dan Politik

Rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik.

Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggungjawab sosial khususnya perlindungan harga yang memihak nelayan. Namun demikian perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah rupanya

terkalahkan dengan strategi yang dibangun oleh para tengkulak atau para pedagang yang datang dari luar daerah. Kedatangan para pedagang umumnya merusak harga ikan, harga yang semestinya memihak rakyat jadi sebaliknya. Para nelayan umumnya mengeluhkan kelakuan para pedagang, ketika tangkapan ikan sedang tidak bagus harga ikan tidak diimbangi dengan kenaikan harga, pada saat tangkapan ikan sedang membanjir, pedagang seenaknya memainkan harga ikan. Berangkat melalui kasus tersebut nelayan mengeluhkan:

Pedagang ikan yang datang dari luar umumnya tidak memikirkan nasib nelayan, tidak memikirkan resiko yang dihadapi, membeli ikan dengan harga seenaknya dan semurah mungkin. *Mesakno mas nelayan kene ki, keluargane kadang-kadang gak kebagean, misale masyarakat kepingin iwak tapi kudu tuku karo bakul. Sementara harga ikan nek wis dikuasai bakul saenake dewe* (Kasihannya mas nelayan sini, keluarganya tidak kebagian ikan apa lagi masyarakat yang berminat beli ikan harus beli dengan tengkulak. Sementara harga ikan kalau sudah dikuasai pedagang memberikan harga seenaknya sendiri). *Jaman sak durunge bakul teko kene masyarakat iso tuku iwak karo nelayan langsung, tapi sak iki kudu tuku karo bakul* (zaman dahulu sebelum pedang ikan berdatangan dulu masyarakat bisa beli ikan langsung dengan para nelayan, tetapi sekarang harus beli dengan pedagang) (Wawancara Soiman, 27 Agustus 2013).

Saat ini jumlah nelayan-petani di Watukarung telah mencapai 70 orang lebih. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat nelayan, ia mengatakan bahwa “pemerintah setempat kurang memperhatikan nasib nelayan, walaupun sebetulnya nelayan punya andil besar terhadap kebutuhan masyarakat luar”. Pemerintah setempat juga tidak mengatur para pedagang ikan mungkin dengan cara mendirikan koperasi nelayan atau sejenisnya, sehingga pedagang atau tengkulak tidak seenaknya sendiri memainkan harga ikan.

Di sinilah barangkali kapitalisasi masyarakat nelayan terjadi, di mana harga ikan dikuasai *juragan* dari luar daerah. Dalam kesempatan itu juga para nelayan mengatakan bahwa “pernah ketika sedang musim tangkapan ikan membanjir, ikan dari berbagai macam jenis tidak ada harganya bahkan *saking jengkele mas iwak cuik dibuang kanggo rabuk kayu jati, ora sithik mas pernah sak ton luwih dibuang kanggo rabuk tanaman*” (ketika sudah jengkel jenis ikan cuik hanya dibuang sia-sia buat pupuk kayu jati, tidak sedikit sampai satu ton lebih hanya dipakai pupuk tanaman).

Keadaan ini semakin diperparah pula oleh sistem dan mekanisme pemasaran hasil. Pengolahan yang dilakukan secara higienis oleh pedagang ikan dihargai sama dengan produk ikan yang diolah kurang higienis. Padahal pengolahan hasil yang higienis memerlukan

pembiayaan yang lebih besar. Kondisi demikian menghambat keinginan masyarakat melakukan pengolahan hasil secara higienis.

Selain itu, sistem tataniaga hasil penangkapan maupun hasil olahan dimonopoli oleh beberapa pedagang ikan. Ikan segar pemasarannya dikuasai oleh beberapa juragan ikan di pasar pelelangan. Sementara pemasaran ikan hasil olahan dikuasai oleh pedagang pemilik gudang.

Pemasaran ikan segar di pelelangan dikeluhkan banyaknya pungutan-pungutan baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Akibat besarnya pungutan tersebut, pedagang terpaksa menekan harga kepada nelayan. Permasalahan tata niaga ikan hasil olahan adalah kuatnya monopoli pedagang pemilik gudang, sehingga proses transaksi tawar-menawar tidak berlangsung secara berimbang.

Secara bersamaan ketiga faktor tersebut (lemahnya penguasaan teknologi, lemahnya permodalan, dan sistem tataniaga yang kurang efektif) dalam jangka waktu yang lama telah ikut memberikan andil besar bagi ketertinggalan kesejahteraan masyarakat nelayan. Untuk itu perlu ditemukan alternatif pemecahan permasalahan ketiga faktor tersebut dan mengimplementasikannya merupakan kebutuhan bagi pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan.

5. Musim Paceklik

Sebagaimana diungkapkan oleh Akhmad Solihin (*Pikiran Rakyat*, 11 Juli 2004) serta kajian sebelumnya nampaknya masyarakat nelayan sulit dilepaskan dari jebakan kemiskinan, betapa tidak, sejak bulan Februari hingga Juli biasanya masyarakat nelayan dihadapkan pada musim *paceklik* yang tak kunjung akhir. Untuk mengatasi masalah di musim paceklik ini, berbagai upaya telah dilakukan nelayan, contohnya adalah beberapa nelayan Watukarung, demi menyambung hidup keluarganya nelayan tersebut beralih profesi kerja sebagai petani. Namun menjadi petanipun juga tidak mudah karena harus berhadapan dan perlu memperhatikan musim (*pranata mangsa*). Dalam kesempatan percakapan seorang petani-nelayan mengatakan bahwa

“musim *paceklik* adalah permasalahan klasik bagi nelayan dan akan senantiasa datang setiap tahun. Dengan kata lain, setiap tahun masyarakat nelayan harap-harap cemas sebab akan berhadapan dengan musim yang dapat membuatnya sengsara. Ironisnya, hingga saat ini nelayan di Watukarung belum pernah mendapatkan bantuan untuk jaminan keselamatan atau masa depan keluarganya dalam menghadapi musim *paceklik* itu” (Seri, wawancara 25 Agustus 2013).

Umumnya nelayan mengeluhkan kepada pemerintah kabupaten yang kurang peduli dengan nasib mereka. Pernah mengusulkan bantuan kepada Pemda Pacitan seperti sarana TIM SAR jika terjadi kecelakaan nelayan, namun hingga saat ini kurang atau bahkan sering tidak ada tanggapan.

Terkait dengan profesi dan nasib hidup yang tidak menentu para nelayan menerangkan tentang profesi nelayan tetap menjadi pilihan terakhir masyarakat pesisir. Salah satunya adalah, disebutkan bahwa walaupun sering tertimpa musim *paceklik* profesi nelayan tetap menjadi pilihan terakhir dikarenakan tidak adanya peluang kerja di daratan yang pasti (*push factor theory*). Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa profesi nelayan diminati karena menarik dan relatif menguntungkan (*pull factor theory*). Oleh karena itu dalam upaya guna menghadapi ketidakpastian nasib ekonomi umumnya pada musim-musim tertentu beralih profesi sebagai petani, sebab memang jika dicermati lebih dekat masyarakat nelayan Watukarung sebetulnya memiliki profesi sebagai petani.

Namun pandangan yang kedua ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan Indonesia yang tetap miskin. Selain kedua teori tersebut, dipilihnya profesi nelayan dikarenakan bersifat *given*, dimana profesi nelayan menjadi *the way of live* yang diturunkan dari generasi ke generasi (Satria, *Tempo*, 5 Juli 2003). Dengan demikian, banyak hal yang menyebabkan kenapa profesi nelayan menjadi pilihan terakhir. Namun yang pasti, profesi nelayan dari generasi ke generasi hanya mewariskan kemiskinan yang semakin akut karena kompleksnya permasalahan.

Selain itu, kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Kondisi inilah yang mengakibatkan nelayan dijauhi oleh institusi-institusi perbankan dan perusahaan asuransi, seperti sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan akses pinjaman modal, baik untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Di tengah kesusahan itulah, masyarakat nelayan menggantungkan hidupnya pada institusi lain yang mampu menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Jaminan sosial dalam suatu masyarakat merupakan implementasi dari bentuk-bentuk perlindungan, baik yang diselenggarakan oleh negara, maupun institusi-institusi sosial yang ada pada masyarakat terhadap individu dari resiko-resiko tertentu dalam hidupnya (Benda-Beckmann, 2001).

Selama ini, tidak adanya alternatif institusi di wilayah pesisir dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat nelayan menyebabkan mereka beberapa kali harus jatuh pada pola atau institusi patron-klien yang menurut para peneliti (perspektif *etic*) sering bersifat asimetris. Dalam hubungan ini, klien kerap dihadapkan pada sejumlah masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berakhir yang sebenarnya inilah jebakan patron demi melanggengkan usahanya.

Namun demikian berdasarkan pandangan nelayan (perspektif *emic*), kuatnya pola patron-klien di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian, sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal (patron). Pilihan atau alternatif lain khususnya masyarakat Watukarung adalah ketika musim *paceklik* adalah mengolah lahan garap (ladang). Musim tanam pun juga memperhatikan waktu tanam (*pranoto mongso*), sebab ketika menanam tidak memperhatikan waktu tanam jarang sekali berhasil panen dengan baik.

6. Solusi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Berdasarkan data yang ada luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta Km² (berdasarkan konvensi PBB tahun 1982), di samping itu Indonesia juga menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non hayati cukup melimpah (Resosudarmo, dkk., 2002). Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tinggal dan menempati daerah sekitar pantai dan menggantungkan hidupnya sebagai nelayan.

Keberadaan kehidupan nelayan selama ini dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yang terus membelitnya, seperti lemahnya manajemen usaha, rendahnya adopsi teknologi perikanan, kesulitan modal usaha, rendahnya pengetahuan pengelolaan sumberdaya perikanan, rendahnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan lain sebagainya mengakibatkan kehidupan nelayan dalam realitasnya menunjukkan kemiskinan.

Pemerintah melalui Departemen Perikanan dan Kelautan selama ini telah melakukan kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang berjalan berdasarkan kebijakan KepMen no 41 Tahun 2000 Departemen Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Tujuan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (DKP, 2002).

Kebijakan tersebut menghendaki perlu adanya partisipasi masyarakat, karena keikutsertaan masyarakat akan membawa dampak positif, mereka akan memahami berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Untuk itu, dalam partisipasi masyarakat diperlukan adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi yang berkenaan dengan program, proyek atau kebijakan yang disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal (Hadi dalam Harahap, 2001).

Salah satu faktor yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat nelayan adalah pembinaan yaitu antara lain; melalui penyuluhan dan pendidikan yang terus-menerus kepada masyarakat setempat. Pembinaan masyarakat dapat dilihat dari beragam pendekatan, sehingga dapat memahami pokok-pokok pikiran tentang pembinaan, antara lain; pembinaan merupakan suatu sistem pendidikan non formal, yang berupaya mengubah perilaku sarannya. Pembinaan masyarakat nelayan sebagai suatu sistem berarti terdiri dari elemen-elemen sistem yang saling terkait satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Adapun elemen-elemen sistem yang penting adalah: sasaran pembinaan, metode pembinaan, dan pembina.

Sasaran pembinaan dapat terdiri dari sasaran utama pembinaan, sasaran penentu pembinaan, dan sasaran pendukung pembinaan. Oleh karena itu yang menjadi sasaran utama pembinaan adalah seluruh warga masyarakat nelayan yang terdiri dari bapak nelayan, ibu nelayan, pemuda ataupun anak-anak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam kegiatan dan pengelolaan usaha perikanan. Sebagai sasaran utama pembinaan, mereka harus menjadi pusat perhatian pembina, sebab mereka inilah yang selalu terlibat dalam pengambilan keputusan akhir tentang segala sesuatu baik mengenai teknik penangkapan, peralatan penangkapan, sistem pemasaran dan lain-lain.

Selanjutnya sasaran penentu dalam pembinaan adalah pihak-pihak yang bukan pelaksana kegiatan usaha perikanan tetapi secara langsung atau tidak langsung terlibat sebagai penentu kebijakan pembangunan perikanan. Sasaran penentu pembinaan antara lain seperti :

- a. Pimpinan wilayah yang memiliki kekuasaan mengambil keputusan kebijakan pembangunan perikanan dan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di wilayah kerjanya.

- b. Tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama, tokoh adat, guru dimana mereka yang memiliki kekuasaan atau wibawa untuk menumbuhkan opini publik atau dijadikan panutan oleh masyarakat setempat.
- c. Para peneliti dan para ilmuwan sebagai sumber pembawa informasi atau teknologi seperti teknik penangkapan, pengelolaan usaha perikanan, pengorganisasian kelompok nelayan dimana hal ini yang diperlukan oleh masyarakat nelayan.
- d. Lembaga keuangan dimana dapat menyediakan kemudahan kredit bagi nelayan yang memerlukan. Seperti antara lain untuk keperluan pengelolaan usaha perikanan, dan peralatan penangkapan.
- e. Produsen dan penyalur sarana produksi perikanan atau peralatan penangkapan.
- f. Pedagang atau lembaga-lembaga pemasaran hasil-hasil perikanan
- g. Pengusaha atau industri pengolahan hasil-hasil perikanan.

Jadi yang dimaksudkan dengan sasaran pendukung dalam pembinaan adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tak langsung tidak memiliki hubungan kegiatan dengan pembangunan perikanan, tetapi dapat diminta bantuannya guna melancarkan pembinaan masyarakat nelayan. Seperti antara lain; para Lembaga Swadaya Masyarakat, pekerja sosial , dan konsumen hasil-hasil perikanan.

Sistem pembinaan masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memperhatikan dan memahami secara baik setiap elemen-elemen sistim yang terkait dan berpengaruh terhadap kerja sistim pembinaan itu sendiri. Elemen-elemen sistim yang terdiri dari sasaran pembinaan, metode pembinaan dan pembina cukup kompleks, sehingga untuk itu perlu adanya keterpaduan berbagai disiplin ilmu dalam merencanakan suatu bentuk kegiatan pembinaan masyarakat nelayan yang berkelanjutan, sehingga dapat membantu dan membangun pola hidup masyarakat nelayan yang lebih baik.

7. Strategi Adaptasi dan Pranata Sosial

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa musim *paceklik* akan hadir dalam setiap tahunnya. Oleh karenanya berbagai strategi adaptasi dilakukan masyarakat nelayan untuk bertahan hidup. Menurut Kusnadi (2000) dalam bukunya *Nelayan: Strategi Adaptasi dan*

Jaringan Sosial, disebutkan bahwa strategi adaptasi yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (*the division of labour by sex*) yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kaum perempuan biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial-ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan-pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranata-pranata tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, dimana penduduk miskin itu hidup.

Sementara itu strategi adaptasi lain yang dilakukan para nelayan (kaum suami) adalah diversifikasi pekerjaan untuk memperoleh sumber penghasilan baru. Bahkan, strategi adaptasi dalam rangka mempertahankan hidup tersebut diselingi dengan menjual hasil panen dari ladang atau kebun berupa singkong, jagung, kelapa, dan beberapa hasil tanaman lainnya. Namun, beberapa strategi ini pun tidak mudah didapat karena berbagai faktor telah membatasi akses mereka terutama mobilitas pasar tradisional yang harus menunggu hari pasaran (*Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing*).

Oleh karena itu, dengan keterbatasan yang ada, masyarakat nelayan mengembangkan sistem arisan sebagai model penyelenggaraan pranata sosial yang merupakan pilihan strategi adaptasi yang sangat signifikan untuk dapat mengakses sumberdaya ikan yang semakin langka. Jaringan sosial diartikan oleh Mitchell sebagai seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara kelompok orang (Kusnadi, 2000).

Bagi masyarakat nelayan, jaringan sosial merupakan salah satu potensi budaya yang dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk menyikapi tekanan ekonomi. Kendati pun demikian, harus diakui bahwa pemanfaatan fungsi jaringan sosial masih bersifat karitatif, bukan merupakan solusi substansial untuk mengatasi berbagai kesulitan sosial-ekonomi rumah tangga nelayan secara mendasar. Hal ini dikarenakan, faktor-faktor penyebab kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan sangat kompleks. Setelah penulis menemui para nelayan umumnya belum ada upaya pemerintah dalam hal ini bantuan

modal misalnya dalam bentuk koperasi. Model inilah barangkali perlu terobosan penataan sistem ekonomi nelayan di Pantai Watukarung.

8. Penguatan Pasar Lokal-Tradisional

Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan lokal dan penciptaan pasar, khusus untuk ikan hasil olahan (ikan kering). Penguatan kelembagaan lokal adalah untuk menguatkan sistem tata niaga intern masyarakat nelayan. Sebuah keluhan yang menyebabkan mereka sangat tergantung dengan pedagang pemilik gudang adalah ketidakmampuan mereka membangun dan mengelola pergudangan ikan kering. Penggudangan sangat diperlukan terutama saat hasil penangkapan melimpah. Ada beberapa persyaratan teknis gudang yang dapat menampung ikan kering olahan, seperti pengaturan suhu, kelembaban dan sirkulasi udara. Jika dilakukan bimbingan setidaknya dipastikan nelayan dapat mengelola gudang ikan secara mandiri. Penyediaan modal bagi mereka untuk dapat membangun gudang yang memenuhi persyaratan teknis diperlukan bimbingan teknis dan manajerial. Namun sebelum itu dapat dilakukan, maka penguatan kelembagaan merupakan pra-syarat yang mesti dilakukan.

Selanjutnya adalah penciptaan pasar, melalui penataan kembali jalur tata niaga yang semula dilakukan oleh pedagang pengumpul kemudian keberadaan pedagang pemilik gudang yang mana fungsinya diambil alih oleh nelayan melalui kelompoknya. Pedagang pengecer yang semula berinteraksi dengan pedagang pengumpul dialihkan ke kelompok nelayan. Pelaksanaan sistem ini memerlukan waktu yang upaya keras. Pedagang pemilik gudang secara teknis sulit di hilangkan, akan tetapi keberadaan mereka disaingi oleh kelompok nelayan. Karena adanya saingan ini secara perlahan akan menyebabkan pedagang pemilik gudang berbagai penyesuaian yang secara ekonomis memberikan dampak bagi peningkatan daya tawar nelayan karena tersedianya lembaga tataniaga alternatif yang dapat bersaing dengan pedagang pemilik gudang. Dengan demikian pedagang pemilik tidak dapat secara leluasa menikmati keuntungan yang terlalu besar. Secara perlahan prinsip keadilan dalam efektivitas tata niaga dapat dicapai.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penguatan ekonomi pada sektor kelautan diperlukan pola pranata sosial-ekonomi yang tepat. Penguatan tersebut berangkat dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat

nelayan khususnya di Watukarung, Kabupaten Pacitan. Berbagai kendala yang dihadapi adalah; (1) kondisi geografis yang sulit untuk dikembangkan, (2) ilmu pengetahuan tata kelola masyarakat (SDM) yang masih sangat terbatas, (3) sentuhan atau perhatian pemerintah baik melalui penyuluhan, pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat masih kurang, (4) terbatasnya akses mobilitas sosial ekonomi (sarana dan prasarana atau IPTEK). Oleh karena itu kasus tersebut mestinya menjadi tanggungjawab sosial bersama baik pemerintah pusat maupun daerah, lembaga ekonomi dan sosial setempat (termasuk LSM), dan partisipasi masyarakat secara sadar.

Tidak bisa pungkiri keadaan yang demikian masyarakat nelayan cenderung mengalami kemiskinan dan terjadi pemiskinan, namun perlu model atau strategi-strategi dalam upaya mengatasi kemiskinan tersebut. Strategi mengatasi kemiskinan masyarakat nelayan sebaiknya harus diawali dengan adanya data akurat statistik. Selanjutnya ditindaklanjuti mengenai apa penyebab dari kemiskinan tersebut, apakah karena jeratan utang atau faktor lain.

Kemudian cara atau metode untuk menanggulangnya lebih terfokus, pada nelayan-nelayan yang berada pada subordinasi *tokeh*. Bagaimanapun juga bahwa penyebab kemiskinan tidaklah sama di semua wilayah, bahkan ukurannya pun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat, sehingga formula pengentasan kemiskinan pun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak bisa disamakan dengan ukuran kemiskinan buruh di perkotaan. Bahkan dalam suatu kabupaten yang sama belum tentu bisa diratakan ukurannya pada desa-desa pesisir yang ada. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Selain itu, peranan hukum juga menjadi sangat penting untuk mensejahterakan para nelayan.

Bagi masyarakat nelayan, jaringan sosial merupakan salah satu potensi budaya yang dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk menyikapi tekanan ekonomi. Kendati pun demikian, harus diakui bahwa pemanfaatan fungsi jaringan sosial masih bersifat karitatif, bukan merupakan solusi substansial untuk mengatasi berbagai kesulitan sosial-ekonomi rumah tangga nelayan secara mendasar. Hal ini dikarenakan, faktor-faktor penyebab kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan sangat kompleks. Setelah penulis menemui para nelayan umumnya belum ada upaya pemerintah dalam hal ini bantuan

modal misalnya dalam bentuk koperasi. Model inilah barangkali perlu terobosan penataan sistem ekonomi nelayan di Pantai Watukarung.

2. Saran/Rekomendasi

- a. Melalui hasil penelitian ini peneliti berharap dengan maksimal baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis tentunya dapat menambah informasi kajian pustaka terkait pola hidup masyarakat nelayan yang memerlukan pranata, sehingga pengalaman ketahanan hidup masyarakat nelayan menjadi dasar kajian berikutnya, tentunya agar hasil kajian berikutnya lebih luas dan mendalam mestinya melalui cara pandang yang berbeda. Kemudian secara praktis hasil penelitian ini mampu menjadikan materi kajian oleh pemerintah setempat (Bupati dan jajaran terkait) di dalam mengambil keputusan (*decision making*).
- b. Tentunya kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan.
- c. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan. Semestinya ada instrument kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan.
- d. Di samping itu pemerintah daerah setempat hendaknya melakukan pembinaan dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan, sebab pemerintah memiliki tanggungjawab sosial khususnya perlindungan harga yang memihak nelayan.
- e. Agar tidak menyengsarakan masyarakat nelayan, pemerintah daerah hendaknya mengontrol harga ikan atau setidaknya turut campurtangan melakukan pembelaan harga ikan yang membela nelayan. Harga ikan mestinya tidak diserahkan sepenuhnya kepada kapitalis (pemilik modal atau para tengkulak).

DAFTAR PUSTAKA

- Arumbiang, Kasihono. 2008. *Kiat Mengentaskan Kemiskinan di Pedesaan Tanpa Menggunakan Dana APBN*. Aliansi Koperasi Pertanian Indonesia. Jakarta: Delima Rimbun.
- Andini, Ayu. 2009. *Indonesia Gelar World Ocean Conference Pertama di Dunia*. www.indofamilynet.com, 04-05-2009 18:43.
- Bakara, Evin H. "Antara WOC dan Ruwetnya Persoalan Kelautan Indonesia". www.harian-global.com. 15-05-2009 10:39.
- Berita Resmi Statistik No. 26/05/Th. XII, 1 Mei 2009
- Data Biro Pusat Statistik (BPS) per Maret 2008.
- Emerson, Donald K. 1979. *Bagaimana Menaikkan Taraf Hidup Lapisan Masyarakat Termiskin di Desa Pantai?*, Semarang: PPWP.
- Firth, Raimond. 1966. *Malay Fisherman, Their Peasant Economy*, London: Routledge and Regent Paul Ltd.
- Giddens, Antony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*. Jakarta: UI-Press.
- Ihwan Sudrajat. "Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan". *Suara Merdeka*. 13 Desember 2002.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*. Jakarta: Gramedia.
- Kent, George. 1993. "Analizing Conflict and Violence", dalam *Peace and Change*, Volume 18 No. 4.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia
- _____. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS
- _____. 2006. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS
- _____. 2006. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta: LKiS
- _____. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LKiS

- _____. 2008. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS
- Matsumoto, David. 2000. *Budaya dan Psikologi*. Belmont: Wadsworth.
- Mubyarto, Loekman Sutrisno, Michael Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Jakarta: Rajawali.
- Mubyarto, dkk.. 1988. *Studi Pengembangan Desa Pantai di Propinsi Riau*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Lubis, Todung Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta : LP3ES.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sahab, Kuniadi. 2007. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samhadi, Sri Hartati., Ahmad Arif, dan Maria Hartiningsih. “*Petani Berhadapan dengan Kekuasaan*”. *Kompas*, 11 April. 2008, 41.
- Sartini, 2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebagai Kajian Filsafati*. *Jurnal Filsafat*. 37 (2): 111-120. wordpress.com/2009 (Diakses 10 April 2009)
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS
- Sayogyo. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Sayuti, S.A. 2005. *Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara “Yang Lain” dan Kearifan Lokal*. <http://www.semipalar.net>. (Diakses 12 April 2009).
- Sudrajat, Ihwan. 2002. *Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan*. *Suara Merdeka*, 13 Desember 2002.
- _____. 2006. *Separuh Penduduk Masih Rentan Menjadi Miskin*”, *Kompas*, 8 Desember 2006.
- Suyanto, Bagong. 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wahyono, Ari dkk. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Presindo.

